

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu langkah dalam membuat sesuatu yang belum ada menjadi ada atau membuat suatu perubahan yaitu membuat sesuatu menjadi lebih baik atau meningkat. Bangsa Indonesia telah 69 tahun memperoleh kemerdekaannya. Usia 69 tahun bagi sebuah negara yang merdeka seharusnya telah menempatkan bangsa tersebut pada tahapan dewasa. Kedewasaan yang dimaksud ialah mampu membuat pilihan yang bijak serta memaksimalkan semua potensi yang ada untuk kesejahteraannya. Dalam konteks pembangunan, hal ini bisa berimplikasi bahwa terlaksananya pembangunan yang menempatkan seluruh masyarakatnya sebagai sasaran agar dapat hidup sejahtera tanpa pengecualian.

Pembangunan manusia menurut UNDP merupakan proses memperluas pilihan-pilihan penduduk (*people's choice*). Dari sekian banyak pilihan, ada tiga pilihan yang dianggap paling penting untuk mewakili standar hidup sejahtera, yaitu: panjang umur dan sehat, berpendidikan, dan standar hidup yang layak. Untuk mengukur ketiga pilihan tersebut, UNDP menyusun suatu indeks komposit berdasarkan tiga indikator, yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf penduduk dewasa (*adult literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*). (Ginting, dkk. 2008)

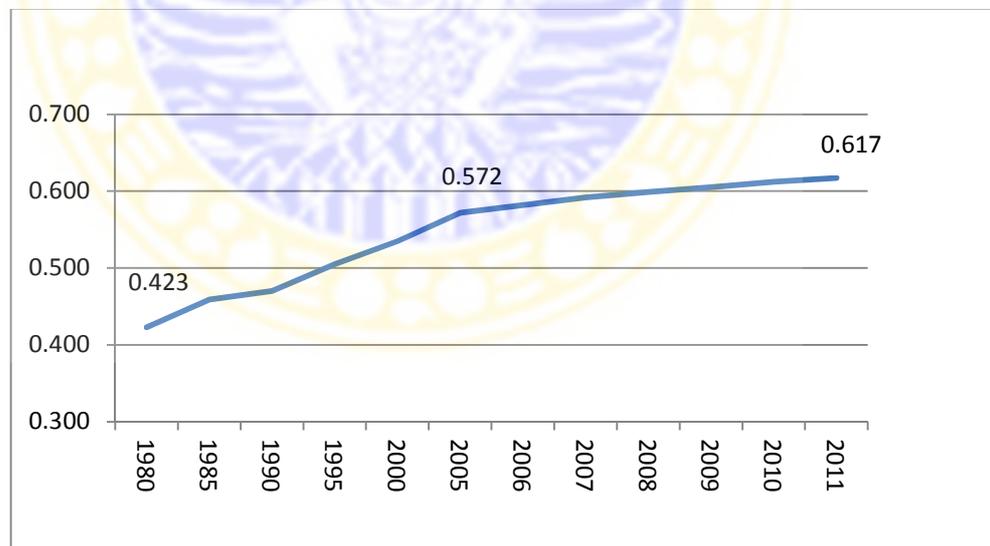
Kondisi bangsa Indonesia yang dilihat dari indeks pembangunan manusia menunjukkan kesejahteraan masyarakatnya masih tergolong dalam kategori

menengah (lihat penggolongan IPM menurut UNDP di hal.15). Memang secara aktual indeks pembangunan manusia Indonesia meningkat dari tahun ke tahun namun bila dibandingkan dengan beberapa Negara berkembang yang lain, Indonesia masih tertinggal.

Tabel 1.1
Pertumbuhan dan Nilai IPM Indonesia 1980-2011

Negara	Laju Pertumbuhan IPM (%)			Nilai Indeks Pembangunan Manusia		
	1980-2011	1990-2011	2000-2011	1980	2010	2011
Malaysia	1,00	0,90	0,69	0,559	0,758	0,761
China	1,73	1,62	1,43	0,404	0,682	0,687
Thailand	1,10	0,89	0,78	0,486	0,680	0,682
Filipina	0,51	0,58	0,62	0,550	0,641	0,644
Indonesia	1,23	1,19	1,17	0,423	0,613	0,617
Vietnam	-	1,50	1,06	-	0,590	0,693

Sumber : *Human Development Report, UNDP 2011*

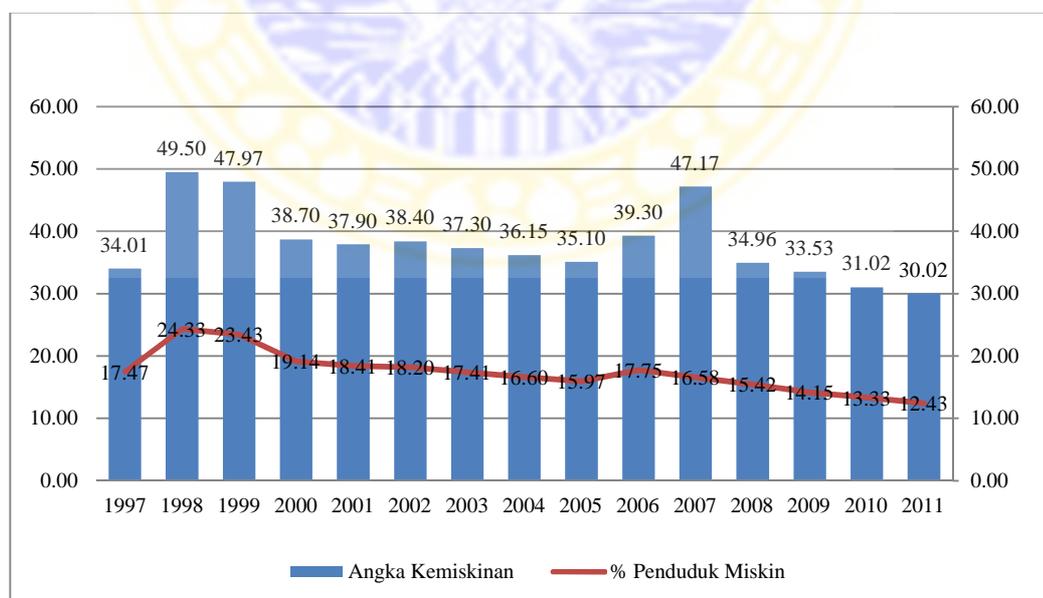


Sumber : *Human Development Report, UNDP 2011*

Gambar 1.1
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia
Tahun 1980-2011

Lanjouw, dalam Ginting dkk.(2008) menyatakan pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena aset utama penduduk miskin adalah tenaga kasar mereka. Adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktifitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan.

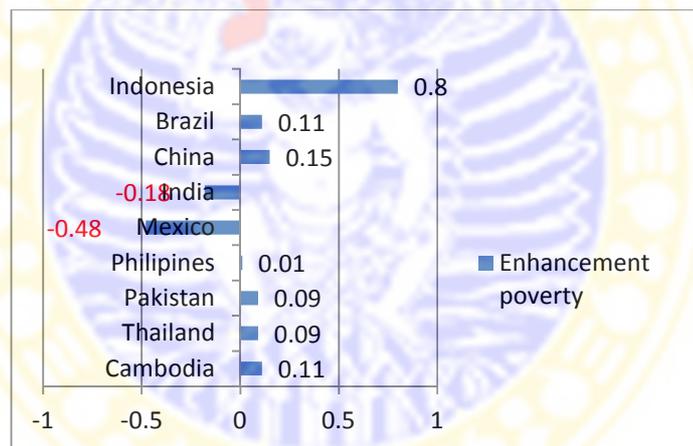
Menurut TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), secara umum angka kemiskinan Indonesia sejak 1998-2011 terus menurun. Kendati belum maksimal, tren penurunan menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah telah berdampak positif bagi peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan hak-hak dasar mereka yang berarti juga telah berdampak pada peningkatan kesejahteraan kaum miskin tersebut.



Sumber : BPS dalam TNP2K 2014

Gambar 1.2
Penurunan angka kemiskinan di Indonesia sejak tahun 1997– 2010

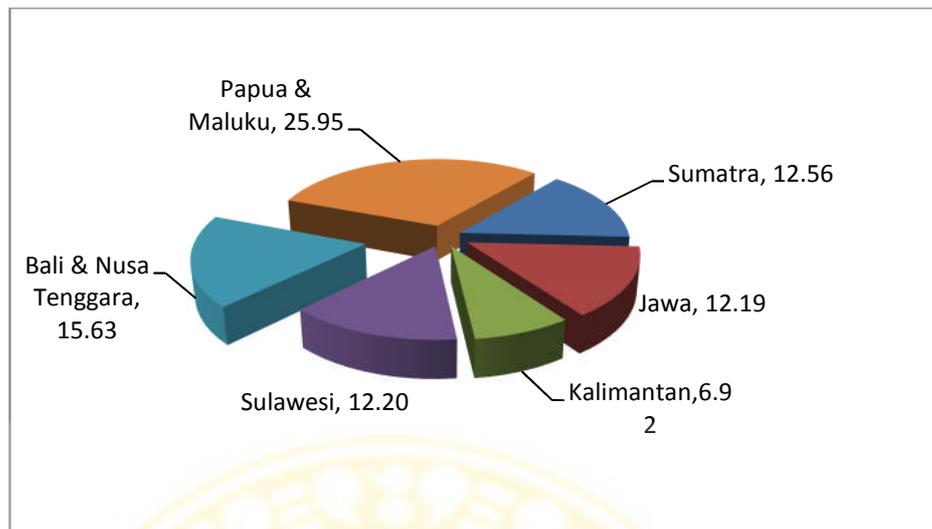
Sementara itu, di tingkat dunia penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia termasuk yang tercepat dibandingkan beberapa negara berkembang lainnya. Dalam gambar 1.3 di haman selanjutnya terlihat pada rentang 2005-2009 Indonesia mampu menurunkan laju rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin per tahun sebesar 0,8 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian beberapa Negara berkembang lain semisal Kamboja, Thailand, dan Brasil yang hanya berada di kisaran 0,1 persen per tahun. Bahkan India dan Mexico mencatat hasil minus atau dengan kata lain terjadi penambahan jumlah penduduk miskin di kedua Negara tersebut.



Sumber : *Worldbank* dalam TNP2K 2014

Gambar 1.3
Perbandingan laju penurunan penduduk miskin tahun 2005-2009

Meskipun Indonesia adalah negara yang paling berhasil menurunkan angka kemiskinan, akan tetapi masih terdapat disparitas antar provinsi. Ada provinsi yang berhasil menurunkan persentase penduduk miskinnya dengan cepat dan ada pula yang lambat. Gambar berikut menggambarkan profil kemiskinan beberapa provinsi di Indonesia tahun 2011.



Sumber : BPS dalam TNP2K 2014

Gambar 1.4
Profil Kemiskinan Per Regional Tahun 2011(%)

Dari Gambar 1.4 di atas terlihat bahwa regional Papua dan Maluku serta regional Bali dan Nusa Tenggara merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin terbesar. Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini merupakan bagian dari regional tersebut yang berarti merupakan salah satu contoh daerah yang masih menghadapi permasalahan dalam penanggulangan kemiskinan.

Nusa Tenggara Timur juga merupakan salah satu provinsi dengan tingkat pembangunan manusia yang masih tertinggal. Bila indeks pembangunan manusia disusun berdasarkan peringkat provinsi maka Provinsi Nusa Tenggara Timur berada pada peringkat 31 dari 33 provinsi yang ada di Indonesia. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel 1.2 di halaman berikutnya. Tabel lengkap untuk peringkat indeks pembangunan manusia dari 33 provinsi seluruh Indonesia dapat dilihat pada halaman lampiran dari tulisan ini.

Tabel 1.2
Peringkat Indeks Pembangunan Berdasarkan Provinsi se-Indonesia
Tahun 2011-2012

Rank	PROVINSI	2011	2012
1	DKI JAKARTA	77.97	78.33
2	SULAWESI UTARA	76.54	76.95
-	-----	-----	-----
30	MALUKU UTARA	69.47	69.98
31	NUSA TENGGARA TIMUR	67.75	68.28
32	NUSA TENGGARA BARAT	66.23	66.89
33	PAPUA	65.36	65.86
	INDONESIA	72.77	73.29

Sumber : Badan Pusat Statistik 2014

Piter Abdullah ,dkk (2002:20) menyatakan bahwa salah satu indikator penentu daya saing daerah adalah sumber daya manusia. Ketersediaan dan kulaitas sumber daya manusia menentukan daya saing daerah berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. Angkatan kerja dalam jumlah besar dan berkualitas akan meningkatkan daya saing suatu daerah.
2. Pelatihan dan pendidikan adalah cara yang paling baik dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja yang berkualitas.
3. Sikap dan nilai yang dianut oleh tenaga kerja juga menentukan daya saing suatu daerah.
4. Kualitas hidup masyarakat suatu daerah menentukan daya saing daerah begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan fakta, beratnya tantangan pembangunan di Nusa Tenggara Timurselama ini antara lain disebabkan oleh isolasi geografis dan iklim yang setengah kering. Nusa Tenggara Timur digolongkan sebagai wilayah setengah

kering karena minimnya curah hujan dan posisinya sebagai wilayah peralihan antara iklim gurun dan iklim basah. Sebagai provinsi kepulauan, ketersediaan akses dan transportasi merupakan isu yang sangat penting. Kombinasi antara iklim setengah kering dan keterisolasian membuat Nusa Tenggara Timur memiliki akses ke sumber daya alam yang terbatas (Profil Kemiskinan NTT, 2013).

Dengan keterbatasan sumber daya alam tersebut membuat pemerintah daerah tidak punya banyak pilihan selain fokus membenahi sisi kualitas sumber daya manusia sebagai sebuah jalan keluar yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fakta menunjukkan bahwa beberapa negara yang ketersediaan sumber daya alamnya terbatas mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pengembangan sumber daya manusia yang lebih baik.

Johana, dkk (2011) memaparkan bahwa secara konsep, pembangunan manusia adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas peluang penduduk untuk mencapai hidup layak, yang secara umum dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas dasar dan daya beli. Pada tataran praktis peningkatan kapasitas dasar adalah upaya meningkatkan produktivitas penduduk melalui peningkatan pengetahuan dan derajat kesehatan.

Rumah tangga memegang peranan penting dalam pembangunan manusia, dimana pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan manusia. Dalam konsep konsumsi rumah tangga, diasumsikan bahwa rumah tangga melakukan aktivitas konsumsi pada dua jenis barang/jasa yaitu makanan (*food*) dan bukan makanan (*non food*). Konsumsi rumah tangga untuk makanan dalam hal ini misalnya konsumsi makanan kalori

dan bergizi, sedangkan konsumsi rumah tangga bukan makanan disini meliputi pengeluaran untuk perumahan, pakain, biaya pendidikan, biaya kesehatan, sanitasi, penerangan dan penciptaan lingkungan yang baik sehingga dapat disimpulkan kesemuanya tersebut secara tidak langsung mempunyai kaitan terhadap pembangunan manusia.

Pengeluaran untuk rumah tangga ditentukan oleh pendapatan. Penduduk yang berpendapatan rendahakan lebih banyak atau bahkan seluruh pendapatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan dibandingkan penduduk yang berpendapatan tinggi. Akibatnya penduduk yang berpendapatan rendah tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak jika hanya mengandalkan pendapatannya. Di sinilah perlu campur tangan pemerintah untuk membantu penduduk yang kurang mampu tersebut. (Ginting dkk, 2008)

Salah satu indikator lagi yang juga disebutkan oleh Piter Abdullah, dkk (2002:21) sebagai indikator yang mempengaruhi daya saing daerah ialah *governance* dan kebijakan pemerintah. Indikator *governance* dan kebijakan pemerintah yang dimaksud ialah kualitas administrasi khususnya dalam rangka penyediaan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat luas serta peraturan-peraturan daerah yang berguna bagi kepentingan masyarakat.

Dalam perekonomian modern, pemerintah merupakan salah satu pelaku ekonomi yang mempunyai peranan penting. pemerintah melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang tidak dapat dilaksanakan oleh pelaku ekonomi lainnya. Campur tangan pemerintah dibutuhkan dalam proses pembangunan untuk

kegiatan-kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Rikwan dan Paidi Hidayat, 2010)

Campur tangan pemerintah yang dimaksud yaitu melalui alokasi anggaran belanja dalam pelayanan publik. Saat ini peran pemerintah tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat karena telah dibagi dengan pemerintah daerah melalui pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Undang-undang No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah berdampak pada munculnya hak, wewenang, serta kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan penerapan undang-undang tersebut maka semakin besarnya tanggungjawab yang dimiliki oleh Pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Peran pemerintah tiap daerah dalam meningkatkan pembangunan manusia dapat dilaksanakan melalui alokasi belanjasektor pendidikan dan kesehatan yang sedemikian rupa agar mampu memberikan dampak positif terhadap pembangunan manusia.

Agar konsep pembangunan manusia di provinsi Nusa Tenggara Timur dapat mudah diterjemahkan ke dalam pembuatan kebijakan, diperlukan penelitian lebih jauh mengenai hal-hal yang memiliki pengaruh signifikan terhadap permasalahan tersebut. Dengan demikian, kita dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah kebijakan yang mampu mendukung program pembangunan manusia secara maksimal. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai pembangunan manusia provinsi Nusa Tenggara Timur. Konsep pembangunan manusia yang akan dikembangkan

dalam penelitian ini ialah dengan melihat bagaimana pengaruh penduduk miskin, pengeluaran konsumsi rumah tangga makanan, belanja pemerintah sektor pendidikan serta belanja pemerintah sektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dari tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari penduduk miskin, konsumsi rumah tangga, dan belanja pemerintah secara simultan terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari penduduk miskin, konsumsi rumah tangga, dan belanja pemerintah secara parsial terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Nusa Tenggara Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui perkembangan indeks pembangunan manusia di Nusa Tenggara Timur.
2. Menganalisis dan membuktikan pengaruh dari penduduk miskin, konsumsi rumah tangga, dan belanja pemerintah secara simultan terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Menganalisis dan membuktikan pengaruh dari penduduk miskin, konsumsi rumah tangga, dan belanja pemerintah secara parsial terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Memberikan informasi atau referensi yang berkaitan dengan masalah pembangunan ekonomi pada umumnya dan pembangunan manusia di Nusa Tenggara Timur khususnya.
2. Dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti lain apabila melakukan penelitian yang berhubungan dengan masalah pembangunan manusia.
3. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah khususnya pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memperhatikan pembangunan manusia sebagai faktor penopang bagi perencanaan perekonomian ke depan, juga pihak-pihak yang terkait dalam menentukan kebijakan-kebijakan dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang pembangunan ekonomi di masa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab. Agar hasil penulisan menjadi lebih sistematis dan mempunyai urutan yang jelas sehingga memudahkan pemahaman skripsi yang ditulis, maka sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi serta sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan mengenai beberapa teori yang relevan untuk digunakan dalam pembahasan lebih lanjut dalam penelitian, penelitian sebelumnya, dan model analisis yang digunakan.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai pendekatan penelitian yang digunakan, definisi operasional, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, serta teknis analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum obyek penelitian, deskripsi hasil penelitian, analisis model dan pembahasan.

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini dikemukakan mengenai simpulan-simpulan dan uraian pembahasan serta saran-saran atas hasil penelitian yang dilakukan.